



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 13 Desember 2023

Halaman: 2

TERAS
Seleksi KPPS
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DIY membuka pendaftaran petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk Pemilu 2024. Sebanyak 83.524 petugas KPPS akan ditempatkan di 11.932 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melaksanakan tahapan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Berbeda dengan Pemilu 2019, kali ini akan dilakukan skrining ketat terhadap kesehatan pendaftar KPPS untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, Kolesterol, gula, dan tekanan darah pendaftar akan dipantau.
Oleh sebab itulah, faktor usia akan menjadi pertimbangan utama. KPPS memang identik dengan wajah-wajah lama. Mayoritas petugas sudah berusia tua dan di antaranya memiliki penyakit bawaan. Berkaca pada Pemilu 2019 dengan intensitas kerja yang menuntut stamina prima, maka KPU mengajak siapa saja bisa menjadi petugas KPPS asal memenuhi syarat. Anak muda juga bisa lebih cepat menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi untuk mendukung pencatatan dalam pemungutan suara.
Pendaftaran KPPS akan berlangsung 11-20 Desember 2023 dengan masa kerja satu bulan sejak 25 Januari-25 Februari 2024. Syaratnya berwarganegara Indonesia berusia 17-55 tahun, minimal pendidikan SMA/ sederajat, surat keterangan bebas narkoba, tidak menjalani pidana atau pernah diancam pidana lima tahun, bukan pengurus partai politik atau sudah tidak menjadi pengurus partai politik setidaknya lima tahun, setia pada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, serta berdomisili di wilayah TPS di mana dia akan bertugas yang ditunjukkan dengan KTP.
KPPS akan menjadi garda depan dalam tahapan pemungutan suara, hingga memastikan surat suara diterima pemilih. Bukan hanya untuk Pilpres saja, mereka juga harus mengurus Pileg untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta DPD. Beban kerja ini membutuhkan stamina serta mental yang kuat, karena mereka juga berinteraksi dengan para saksi dari partai, caleg, maupun pendukung capres. Oleh sebab itu, KPPS harus didampingi tenaga medis serta mendapat logistik dan suplemen yang memadai. Mereka harus mendapat honor yang layak.
Publik berharap minat masyarakat mendaftar jadi petugas KPPS tidak surut, meski pengalaman buruk Pemilu 2019 membuat banyak yang kapok mendaftar lagi. KPPS bukan hanya bentuk temporer saat Pemilu atau Pilkada saja, namun memegang peran penting. Integritas mereka harus terjaga karena rawan melakukan manipulasi suara. Oleh sebab itulah, selain skrining kesehatan, skrining rekam jejak pendaftar KPPS perlu dicermati agar proses pemungutan hingga penghitungan suara berjalan demokratis. ***d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005